# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2000)

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)

Amiruddin dan Zainl Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

AP. Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)

_____, *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, (Bandung: Mandar Maju, 1993)

Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan, Cet 1* (Jakarta: MP Pustaka Margaretha, 2012)

_____, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011)

BF Sihombing, *Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI*), (Jakarta: UI, 2004)

Boedi Harsono*, Hukum Agraria Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1997)

Darwin Ginting, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, (Jakarta: Fokusindo Mandiri, 2013)

Durkheim, Weber, dan Marx dalam H. Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*: *Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan,* (Yogyakarta: Liberty, 1993)

G. Kartasapoetra et al., *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1985)

Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 2004)

Jayadinata Johara, *Tata Guna Tanah dalam perencanaan Pedesaaan Perkotaan & Wilayah*, (Bandung: ITB Bandung, 1999)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008)

Mudakir Iskandarsyah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)

Nugroho Iwan & Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan,* (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2002)

Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995)

Soedikno Mertokoesoemo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1995)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1982)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1992)

Tolib Setiady, *Hukum Tanah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1991)

Urip Santoso, *Perolehan Hak atas Tanah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2015)

**B. Artikel dan Jurnal**

Nur Adhim, "*Model Upaya Hukum terhadap Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tambaklorok, Kota Semarang*)", Gema Keadilan, vol. 6, no. 1, pp. 75-88, Jun. 2019. https://doi.org/10.14710/gk.6.1.75-85

Agus Surono, "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dik Kabupaten Kendal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, p. 392, Desember 2017. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/306/pdf

Rosana Dewi Langelo, "*Penetapan Lokasi dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*", Ubelaj, vol. 3, no. 1, p. 70, April 2018. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/4799

Birman Simamora, "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai*", Jurnal Hukum Respublica, vol. 17,no. 1, p. 175, 2017.https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/1455/1017/

Agus Yafli Tawas, "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Martadinata Paal Dua Di Kota Manado)*", Jurnal Hukum Edisi Khusus, vol. 1, no. 6, p. 68, Oktober-Desember2013.http://repo.unsrat.ac.id/440/1/PENGADAAN_TANAH_UNTUK_KEPENTINGAN_UMUM_STUDI_KASUS_PELEBARAN_JALAN_MARTADINATA_PAAL_DUA.pdf

**C. Tesis**

Tomi Firdaus, Tesis: "*Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lubuk Kilangan - Bungus Teluk Kabung Kota Padang*", (Padang: Unand, 2017)

Andri Besse Tenri Adjeng, Tesis: "*Penetapan Lokasi Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*", (Makassar: Unhas, 2017)

Rika Fitriani, Tesis: "*Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol Sumatera di Wilayah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)*", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Amgasussari Anugrahni Sangalang, Tesis: "*Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012),

Rini Mulyanti, Tesis: "*Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013)

## D. Internet

https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/ diakses pada tanggal 06 September 2020 pukul 12.30

Parwito, "Ganti Rugi Belum Cair Warga Ancam Hentikan Proyek Double Track", http://merdeka.com/peristiwa/ganti-rugi-belum-cair-warga-ancam-hentikan-proyek-double-track.html,diakses 06 September 2020, jam 04.34 WIB

## E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum